



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Kumuh Berkesempatan,
Berkeadilan, Layak, Adaptif, Kolaboratif

bangga
melayai
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJiP 2022

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



bappeda_bone



Bappeda Bone New



bappeda bone

KATA PENGANTAR



bappeda_bone



Bappeda Bone New



bappeda bone

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2018-2023. Kinerja Bappeda diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2022.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Bappeda, sehingga dapat mendukung capaian Visi dan Misi Kabupaten BONE MABESSA. Terima kasih

Watampone, 27 Januari 2023
KEPALA BAPPEDA KAB. BONE,



Dr.H. ADE FARIQ ASHAR, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19850126 200312 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

B. ORGANISASI

C. ISU STRATEGIS

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saling, dan Sejahtera				
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme				
1	Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Konsisten dan berenergi	Meningkatnya kesesuaian dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Penguatan sinergi dan kolaborasi, semua pihak dan keadaban analisis capaian kinerja	Peningkatan hasil evaluasi program perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan IT Penyempurnaan forum-forum perencanaan dengan perangkat daerah, kabupaten kota, kementerian dan stakeholder terkait Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan stakeholder terkait Mangadatkan pelatihan yang bekerja sama dengan Universitas atau Kementerian yang terkait
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi pembangunan daerah	Memfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Peningkatan kualitas SOM evaluator dokumen evaluasi perencanaan	Membangun link antar sistem informasi yang berada diluar Bappeda dan didalam Bappeda
	Meningkatnya konsistensi pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi, dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah antar tingkatan pemerintahan	Menyusun standar atau panduan dalam verifikasi dokumen perencanaan	Peningkatan verifikasi Renstra dan Ranga OPD terhadap target program Renja atau kegiatan RPJMD dan RPJPD
				Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah
				Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan stakeholder terkait
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan urusan perurung Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas SOM dan Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja	Peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia
				Peningkatan pemanfaatan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik berupa ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem monitoring serta juga ketersediaan informasi publik melalui media website Bappeda dan media sosial Bappeda

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

D. PERJANJIAN KINERJA

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

E. PERJANJIAN KINERJA



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN



A. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Kabupaten Bone.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Bone telah menetapkan 6 misi dan Bappeda sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang perencanaan mendukung pencapaian RPJMD pada Misi ke-1 yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme.



Dalam upaya mendukung capaian misi dan sasaran RPJMD yang menjadi tanggung jawab Bappeda sebagaimana dimaksud di atas, disusun Rencana Strategis yang selaras dengan RPJMD sebagai pedoman dan memberikan arah organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan, memuat kesepakatan tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan Bappeda selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Rencana strategis merupakan salah satu mandat prinsip good governance. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Bappeda berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



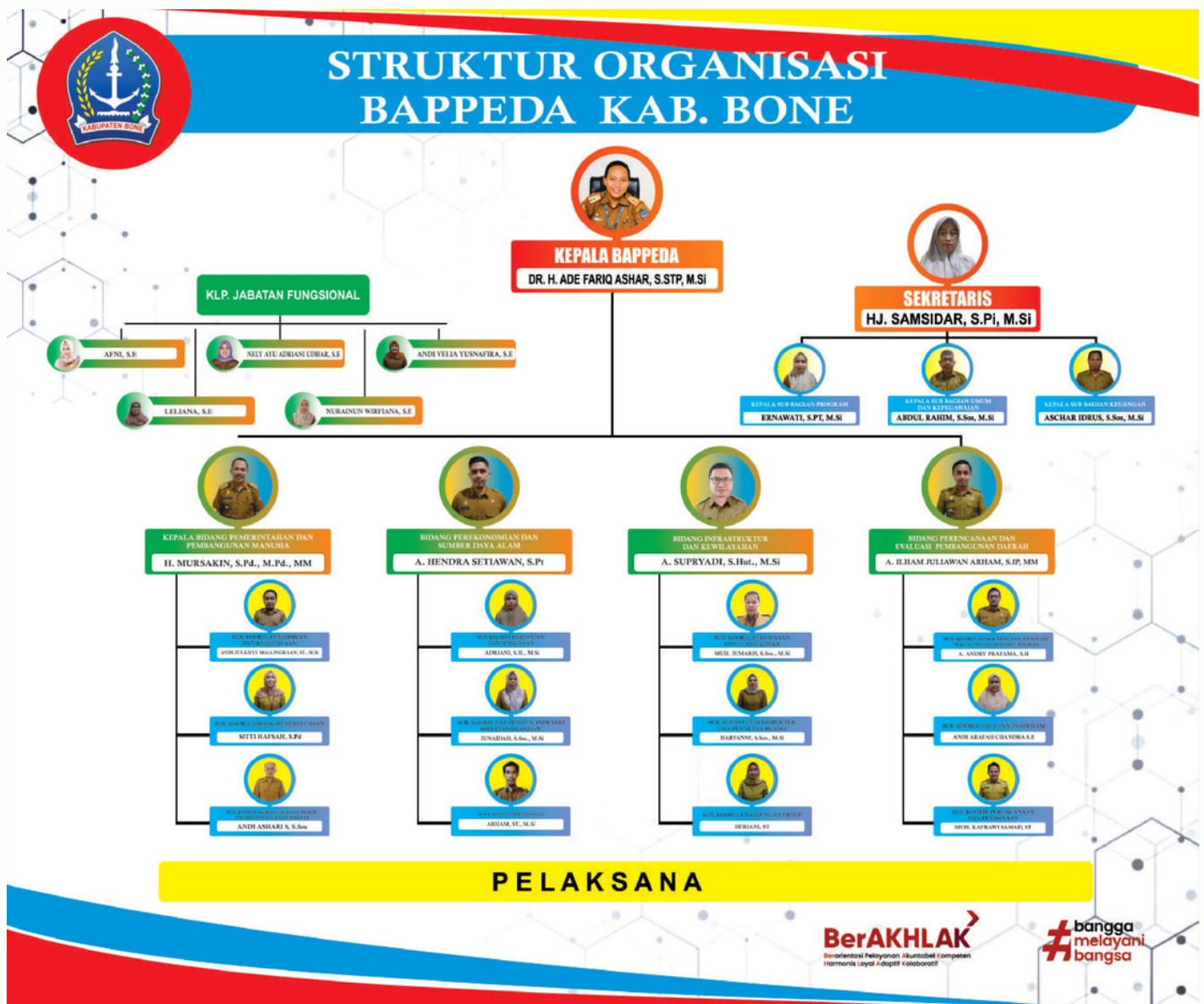
B. ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda juga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
- Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dengan susunan Struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kab. Bone Tahun 2022



Untuk melihat SOTK Bappeda Tahun 2021, Silahkan memindai QR code di samping

Sumber Data : Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resource) Bappeda Kabupaten Bone merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Namun karena adanya perubahan regulasi maka Bappeda mengalami perubahan SOTK yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 93 Tahun 2021.

Peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai tidak hanya tergantung pada teknologi dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja namun perlu didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka.

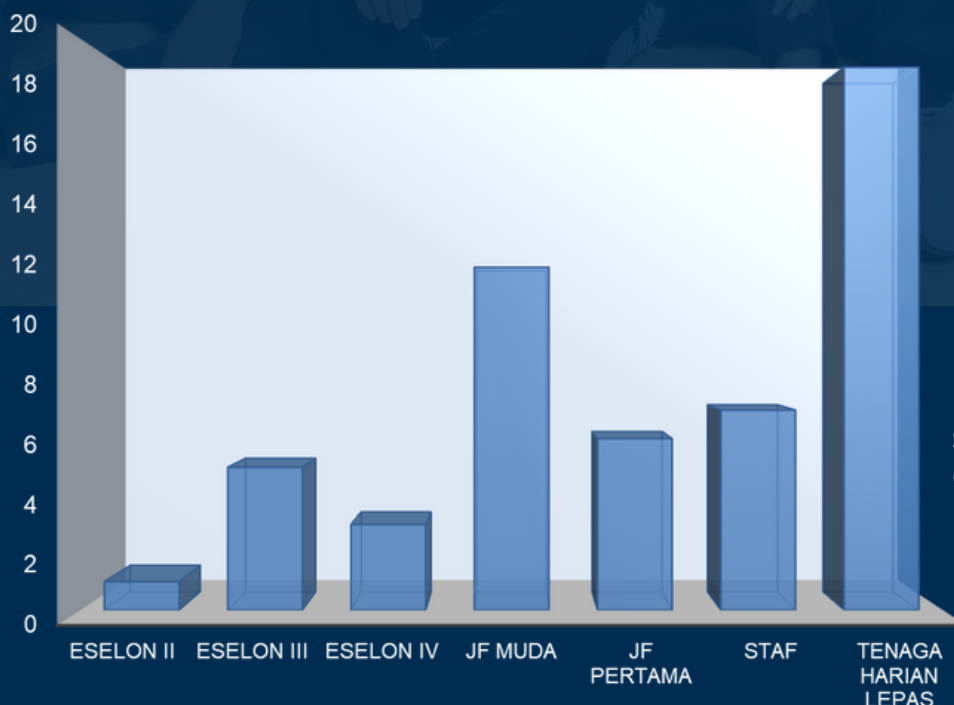
Terkait dengan kualitas SDM, sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi Perencanaan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone yang semakin kompleks kedepannya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda memiliki 34 ASN dan 20 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Bone Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2

Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Jabatan

Grafik Jabatan SDM Bappeda Kab. Bone



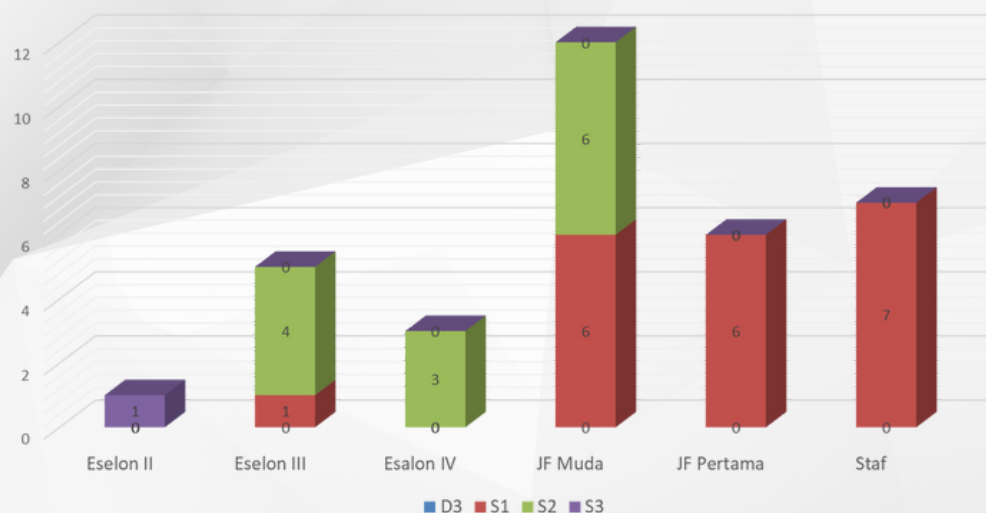
Untuk melihat Data
DUK Bappeda,
Silahkan memindai
QR code di samping



Sumber Data : DUK Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi jabatan esalon II terdiri atas 1 orang yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Bone dan Eselon III berjumlah 5 orang dan untuk esalon IV berjumlah 3 orang, jumlah JF Muda sebanyak 12 orang, JF Pertaman sebanyak 6 Orang dan staf berjumlah 7 orang serta tenaga harian lepas berjumlah 20 orang. Yang terbagi kedalam 4 bidang teknis dan sekretariat.

Gambar 1.3
Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Jumlah
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Data : DUK Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 10 orang dari total pegawai sebanyak 34 orang.

Tabel 1.4
Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Jumlah
Pegawai Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan/Ruang

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	6
4	Penata Tingkat I	III/d	9
5	Penata	III/c	2
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
7	Penata Muda	III/a	10
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	-
12	Juru Tingkat I	I/d	-
13	Juru	I/c	-
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
15	Juru Muda	I/a	-
Jumlah			34

Sumber Data : DUK Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata (S3) berjumlah 1 orang Strata 2 (S2) berjumlah 13 orang dan Strata 1 (S1) berjumlah 20 orang.



Untuk melihat
Data DUK
Bappeda,
Silahkan
memindai QR
code di atas

C. ISU STRATEGIS



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Bone pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone karena dampaknya yang signifikan di masa depan, dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Perumusan isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Bone dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra PD Kab/Kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (outline respon) organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja perangkat daerah seperti Bappeda harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan perencanaan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan alternatif yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi Bappeda dalam peningkatan kinerjanya. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan bidang urusan Bappeda.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi Bappeda yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai Bappeda dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Bappeda itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal: pertama, aspek input/sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan ketiga aspek output/hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Bappeda, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaatan output.



Untuk melihat Data Capaian dan Inovasi Bappeda, Silahkan memindai QR code di samping



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam Jangka Menengah (lima tahun) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bone diarahkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Renstra Bappeda Tahun 2018–2023 merupakan kesatuan gerak dan langkah Aparatur Perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Bappeda di masa mendatang.



Untuk melihat dokumen Renstra Perubahan Bappeda Kab. Bone 2018-2023, Silahkan memindai QR code di samping



Secara lengkap, keterkaitan tujuan dengan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 disertai indikator kinerja sasaran setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Realisasi 2019	2020	2021	2022	2023
Visi : Mewujudkan Kabupaten Bone Mandiri Berdaya Saing dan Sejahtera								
Misi : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme								
Tujuan RPJMD : Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN								
Sasaran RPJMD : Berkurangnya kasus KKN								
Indikator Sasaran RPJMD : Proporsi OPD yang bebas dari KKN								
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Penghargaan Pembangunan daerah					
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	71,00%	44,12%	34%	38%	42%
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah	B (68,55)	B	BB	BB (70-80)	A (80-90)

Sumber Data : Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 merupakan kesatuan gerak dan langkah Aparatur Perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.



B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merelalisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera				
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi dan Nepotisme				
1	Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Konsisten dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Penguatan sinergi dan kolaborasi, semua pihak dan kedalaman analisis capaian kinerja	Peningkatan hasil evaluasi program perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan IT Penyempurnaan forum-forum perencanaan dengan perangkat daerah, kabupaten kota, kementerian dan stakeholder terkait Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan stakeholder terkait Mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan Universitas atau Kementerian yang terkait
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi pembangunan daerah	Memfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Peningkatan kualitas SDM evaluator dokumen evaluasi perencanaan Membangun link antar sistem informasi yang berada diluar Bappeda dan didalam Bappeda
		Meningkatnya konsistensi pembangunan daerah dengan Kebijakan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi, dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah antar tingkatan pemerintahan	Menyusun standar atau panduan dalam verifikasi dokumen perencanaan Peningkatan verifikasi Renstra dan Renja OPD terhadap target program Renja atau kegiatan RPJMD dan RKPD Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat dan stakeholder terkait
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas SDM dan Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja	Peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Peningkatan pemanfaatan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik berupa ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem monitoring serta juga ketersediaan informasi publik melalui media website Bappeda dan media sosial Bappeda

Sumber Data: Renstra Perubahan Bappeda 2018-2023



IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Bappeda adalah:

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih Bappeda setiap tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja PNS di Bappeda;
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja PNS Bappeda.

Informasi dimaksud nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel. 2.3. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	71,00%	44,12%	34%	38%	42%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah	B (68,55)	B	BB	BB (70 - 80)	A (80 - 90)

Sumber Data: Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone



D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya serta sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi organisasi. Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh PNS di lingkungan Bappeda, mulai dari level pimpinan tertinggi (eselon II), sampai ke Pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Untuk melihat dokumen Perjanjian Kinerja 2022, Silahkan memindai QR code di samping



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	38%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terget tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai	100 %
4.	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100 %



Untuk melihat dokumen Perjanjian Kinerja 2022, Silahkan memindai QR code di atas

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.433.687.160
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 896.810.030
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.363.910.810
JUMLAH		Rp. 7.694.408.000

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Tahun 2022

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bappeda Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel.2.4 Standar Penilaian Kinerja

NILAI %	PENCAPAIAN
110 Ke atas	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup Tercapai/Cukup Berhasil
$x < 60$	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan Capaian Indikator Outcomes. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Bappeda merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja eselon II. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek sasaran, program, kegiatan dan indikator yang termuat dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan DPA Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (Bappeda Bone) mengemban amanah masyarakat Kabupaten Bone dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Bappeda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Bappeda. Pengukuran Bappeda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 meliputi:



Tujuan 1:

Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Konsisten dan bersinergi. Dengan Indikator: Penghargaan Pembangunan daerah.

- a. Sasaran 1.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan indikator kinerja yaitu "Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD"
- b. Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan indikator kinerja yaitu: "Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai"
- c. Sasaran 1.3 Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yaitu: "Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan"

Tujuan 2:

Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan indikator kinerja yaitu "Predikat SAKIP oleh APIP.

- a. Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja yaitu "Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh APIP"
- Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:



1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Target Dan Realisasi Kinerja Bappeda Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
1	Proporsi Usulan Kegiatan Masyarakat terhadap total APBD	38%	52,49%	138,13%	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
2	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%	100 %	100 %	Tercapai/Berhasil
3	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100 %	Tercapai/Berhasil
4	Nilai Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB (70-80)	84,43%	105,5%	Tercapai/Berhasil
Rata-Rata Capaian			112,70%		

Berdasarkan data yang disajikan di samping, rata-rata capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2022 mencapai 112,70% dan masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Secara keseluruhan, 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja, telah melampaui target kinerja yang diperjanjikan.

Sumber Data: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2022

Dengan demikian maka secara umum Bappeda Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda tahun 2018-2023.



Untuk melihat dokumen Renstra Perubahan Bappeda Kab.Bone 2018-2023, Silahkan memindai QR code di samping

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Bappeda, apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut:

Tabel. 3. 2 Realisasi Dan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2019 - 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja (%)					Capaian Kinerja (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	70%	71,25	44,12	34,29	52,49	-	101,78	100	100,85	138,13	-
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP oleh APIP	58,87	A (66,55)	B (68,55)	BB (72,59)	A (84,43)	-	100	100	100	105,5	-

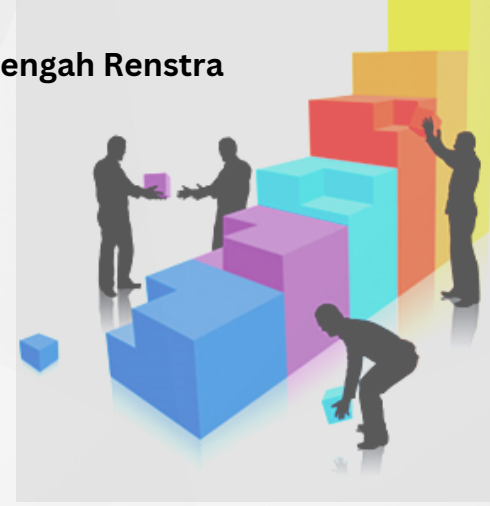
Sumber Data: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa: ada peningkatan trend realisasi pada 2 indikator sasaran, sedangkan 2 indikator sasaran melampaui target dan 2 indikator sasaran mengalami tren realisasi sesuai dengan target kinerja, sedangkan dari nilai capaian kinerja terdapat trend peningkatan pada 4 indikator sasaran dan trend penurunan pada 2 indikator kinerja tetapi nilai capaian dimaksud masih diatas 100% dan dalam kategori sangat berhasil dengan penjelasan sebagai berikut:

- A . Sasaran 1: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Indikator: "Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD" menunjukkan penurunan trend realisasi dan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan data realisasi dancapaian tahun 2021, akan tetapi secara realisasi masih melampaui target kinerja yang diperjanjikan dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data awal.
- B . Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Indikator kinerja yaitu: "Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai" menunjukkan peningkatan trend realisasi dan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan data realisasi dancapaian tahun 2021, akan tetapi secara realisasi antara target dan realisasi sama.
- C . Sasaran 3: Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Indikator kinerja yaitu: "Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan" walaupun tidak ada data awal karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pengukuran pada indikator dimaksud, namun mengalami trend peningkatan realisasi dan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan data realisasi dancapaian tahun 2022.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Target Kinerja (%)					Capaian Kinerja (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	42%	71%	44,12%	34%	38%	-	169,05	105,05	80,95	90,48	-
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	-
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	-
Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah	A	B	BB	A	*A		100	100	100	105,5	-

Sumber Data: Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis Bappeda, dari 4 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 2 indikator kinerja yaitu, Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai dan Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan sedangkan 2 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra yaitu Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD dan Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.



Untuk melihat dokumen Renstra Perubahan Bappeda Kab.Bone 2018-2023, Silahkan memindai QR code di samping



4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Bappeda dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
			2020	2021
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	52,49%	-	-
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%	-	-
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	-	-
Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah	A	-	-

Sumber Data: Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Bappeda tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.5. Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja Bappeda

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
			2020	2021
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	52,49%	-	-
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%	-	-
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	-	-
Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah	A	-	-

Sumber Data: Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.5 di samping, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Bappeda tahun 2022 dalam kategori Berhasil. Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan I Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran I.I Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Dengan semua indikator dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai. Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD dapat dilihat pada diagram di samping:



Dari diagram diatas terlihat bahwa pada APBD tahun 2022 mengakomodir usulan Musrenbang sebesar 52,49% dan mengalami trend penurunan dibanding usulan Musrenbang yang diakomodir pada APBD 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi yang melanda hampir seluruh dunia dan berdampak pada refocusing anggaran. Untuk itu pada tahun 2022 saat penyusunan taget Perubahan Rencana Strategis Daerah Bappeda melakukan peninjauan ulang terhadap target yang telah ditetapkan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan proporsi usulan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan inisiasi program pendampingan pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan unsur masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap program pemberdayaan masyarakat. Bappeda memberi bimbingan teknis terkait perencanaan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pendampingan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Harapannya usulan masyarakat tidak lagi berdasarkan daftar keinginan tetapi merupakan kebutuhan prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan di lingkungan kelurahan/kecamatan;
2. Memperbaiki petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang agar lebih bisa menjawab pertanyaan permasalahan di lapangan dan mudah dipahami pelaksana di lapangan;
3. Memperbaiki dan menyesuaikan kamus usulan Musrenbang agar sesuai dengan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai dasar pegangan pemilihan program kegiatan di e-Musrenbang SIPD;
4. Mengedukasi komponen pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan tentang regulasi daerah terkait program pemberdayaan masyarakat.





Sasaran 1. 2 Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai

ini merupakan salah satu upaya yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pencapaian misi ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah utama. Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Tercapai dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Secara umum, indikator ini telah memenuhi target kinerja, namun ke depan perlu dilakukan upaya perbaikan untuk lebih meningkatkan pencapaian target tahunan prioritas pembangunan daerah.

Sasaran 1. 3 Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.

Definisi: Hasil dari kajian/analisa/studi/rencana induk/grand design sektoral yang mendukung perencanaan apabila:

- Digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
- Ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait teknis pelaksanaannya (ditetapkan sebagai produk hukum).

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Secara umum, indikator ini telah memenuhi target kinerja, namun ke depan perlu dilakukan upaya perbaikan untuk lebih meningkatkan kontribusi kajian/analisa dalam perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan sebagai berikut: Bidang sektoral sebagai bidang yang melaksanakan fungsi penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan, segera menindaklanjuti hasil kajian/analisa dengan menyampaikan kepada dinas teknis sebagai pelaksana di lapangan. Dokumen kajian/analisa jangan hanya menjadi hiasan lemari perpustakaan. Mengutip salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi harus melayani rakyat yaitu bahwa birokrasi jangan lagi pekerjaannya hanya sending-sending, tetapi akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered artinya bahwa birokrasi tidak hanya melaksanakan pekerjaan hanya sampai selesai dan dipertanggungjawabkan, akan tetapi output hasil pekerjaan atau manfaat program harus dapat dirasakan masyarakat atau bermanfaat bagi masyarakat. Menindaklanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo, ke depan Bappeda lebih memaksimalkan penyampaian tindak lanjut hasil kajian kepada perangkat daerah teknis dan memonitoring pelaksanaannya;

SASARAN 2. Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja sasaran hasil dari evaluasi SAKIP menunjukkan predikat Sangat Berhasil yaitu mempunyai nilai capaian 105,5% dengan realisasi nilai SAKIP hasil evaluasi Inspektorat 84,43% dari target nilai SAKIP 70-80. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut: Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 yang dilakukan Inspektorat Daerah pada Bappeda meliputi 5 komponen yaitu:

TAHUN
**20
22**

**KOMPONENPE
RENCANAAN
KINERJA
DENGAN NILAI
28,36 DARI
BOBOT 30;**

**KOMPONENP
ENGUKURAN
KINERJA
DENGAN
NILAI 19,69
DARI BOBOT
25;**

**KOMPONEN
PELAPORAN
KINERJA
DENGAN
NILAI 13,56
DARI BOBOT
15;**

**KOMPONEN
EVALUASI
INTERNAL
DENGAN NILAI
6,33 ARI
BOBOT 10;**

**KOMPONEN
PENCAPAIAN
KINERJA
DENGAN NIILAI
16,50 DARI
BOBOT 20**





6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Bappeda dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Bappeda adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Bappeda dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	38%	52,49%	138,13%	Rp. 896.810.030	Rp. 869.826.740	97%	41,13%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terget tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai	100%	100%	100%	Rp.142.604.860	Rp.135.965.953	95,34%	4,66%
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	Rp.1.363.910.810	Rp.1.339.512.408	98,21	-9721%
Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB (70-80)	84,43%	105,53%	Rp.5.433.687.160	Rp.5.186.504.285	95,45	-9439,47%

Sumber Data: Lembar Kerja LKjIP Bappeda Kab.Bone Tahun 2022 dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bappeda Kab. Bone



Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

Indikator "Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD" dengan capaian kinerja sebesar 138,13% dan capaian anggaran sebesar 97%, menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar 41,13%.

Indikator "Persentase target tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai" dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 95,34% dan efisiensi sumber daya sebesar 4,66%

Indikator "Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP" dengan capaian kinerja sebesar 105,53% dan capaian anggaran sebesar 95,45%.

Indikator "Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur dan Kewilayahan" dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 98,21%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel .3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD	138,13%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	100	100	100	Memfasilitasi Perbaikan Database Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	100	100	100	Memfasilitasi bidang Teknis Bappeda Dalam Memverifikasi Data Teknis OPD
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang RKPD yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100	Melaksanakan koordinasi dengan seluruh aparat perencanaan daerah dalam pelaksanaan setiap tahapan perencanaan terkait Updating data dan informasi perencanaan daerah secara berkala sesuai dengan perkembangan pemutakhiran aplikasi SIPD Kemendagri
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan (laporan)	1 dokumen	1 dokumen	100	
			Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan (dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (Rekomendasi)	5 Berita Acara	5 Berita Acara	100	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terget tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	100	100	100	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase laporan perencanaan dan pendanaan	100	100	100	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Forum Konsultasi Publik yang terlaksana (laporan)	1 Laporan	1 Laporan	100	Updating secara berkala Jadwal Perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung
			Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan (dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	100	100	100	Memfasilitasi Perbaikan Database Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilakukan (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	100	Memfasilitasi Bidang Teknis
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan yang tersusun	100	100	100	Menertibkan pelaporan OPD dalam penyajian Dokumen Evaluasi RKPD
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (Laporan)	4 Laporan	4 laporan	100	Peningkatan Kapasitas SDM Bappeda
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	100%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	Melakukan Monev serta koordinasi dengan OPD terkait
				Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	Melakukan Koordinasi dengan OPD Counterpart masing masing
				Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	Melakukan Sinkronisasi dan harmonisasi untuk pencapaian target dokumen infrastruktur dan kewilayahan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	100	100	100	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun (dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Melakukan Percepatan pengumpulan data dan merampungkan penyusunan dokumen maupun laporan
				Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun (rekomendasi)	23 Rekomendasi	23 Rekomendasi	100	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia yang tersusun (dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Melakukan koordinasi data agar dapat tersusun dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam hal Pembangunan Manusia
				Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan peragkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan evaluasi perencanaan bidang pembangunan manusia yang tersusun (Laporan)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Melakukan monev serta koordinasi ke counterpart masing masing dalam rangka pemenuhan data sektoral
				Jumlah Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia yang tersusun (rekomendasi)	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang tersusun	100	100	100	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang tersusun	1 laporan	1 laporan	99,8	koordinasi yang baik yang dilakukan di internal bidang maupun di OPD Counterpart Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bone
				Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian	4 rekomendasi	4 rekomendasi		

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	99,8	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil evaluasi dan monitoring perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang tersusun	1 laporan	1 laporan	100	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tersusun	100	100	100	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sinkronisasi, koordinasi dalam penyusunan dan update data, dokumen infrastruktur dan kewilayahan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Sinkronisasi, koordinasi dalam penyusunan dan update data, dokumen infrastruktur dan kewilayahan - Menyusun Anggaran berbasis Prioritas - Pelatihan atau Bimtek Peningkatan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sinkronisasi, koordinasi dalam penyusunan dan update data, dokumen infrastruktur dan kewilayahan
Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	105,53%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100	Meningkatkan Kualitas Sdm Melalui Bimtek Baik Secara Daring Maupun Secara Luring
				Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100	100	100	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100	Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Asistensi Renstra/Renja dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	
			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	12 laporan	12 laporan	100	Menunda Proses transfer sebelum memenuhi kelengkapan bukti dukung yang ada serta melakukan pertemuan rapat koordinasi dengan PPTK untuk membahas progres realisasi keuangan lingkup Bappeda Kabupaten Bone
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan	2 paket	2 paket	100	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 Laporan	2 Laporan	100	Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangn Lingkup Bappeda Kabupaten Bone dan Bimbingan Teknis Evaluasi Renja maupun Asistensi Renstra secara internal
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM	2 orang	2 orang	100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	1 paket	1 paket	100	Pendataan Bulanan mengenai pemenuhan rencana kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 paket	12 paket	100	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 paket	12 paket	100	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	4 paket	4 paket	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	100 laporan	100 laporan	100	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Pemeliharaan Website penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	1 Web	1 Web	100	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	Merekapitulasi bentuk bentuk pengadaan ataupun rencana sesuai kebutuhan untuk menunjang kinerja
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengandaan Mebel Kantor sesuai rencana	3 Unit	3 Unit	100	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan	6 Unit	6 Unit	100	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	100	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan	12 Bulan	12 Bulan	100	Melakukan percepatan pembayaran maupun merekap data dalam hal penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	12 laporan	12 laporan	100	
			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	100	100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 paket	1 paket	100	Mengontrol, memantau dan merekap data sarana dan prasarana yang termasuk barang ataupun aset daerah yang terpelihara untuk menunjang urusan pemerintahan daerah
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	6 Unit	6 Unit	100	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun	10 Unit	10 Unit	100	

Sumber Data: Lembar Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2022

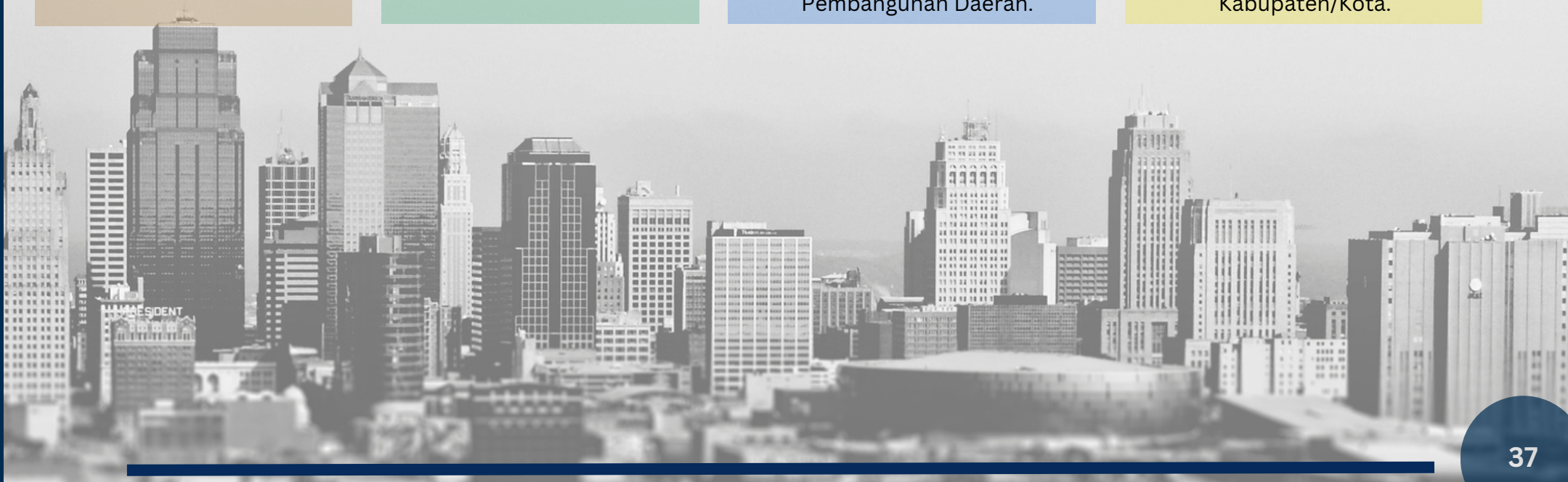
Berdasarkan tabel 3.8 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

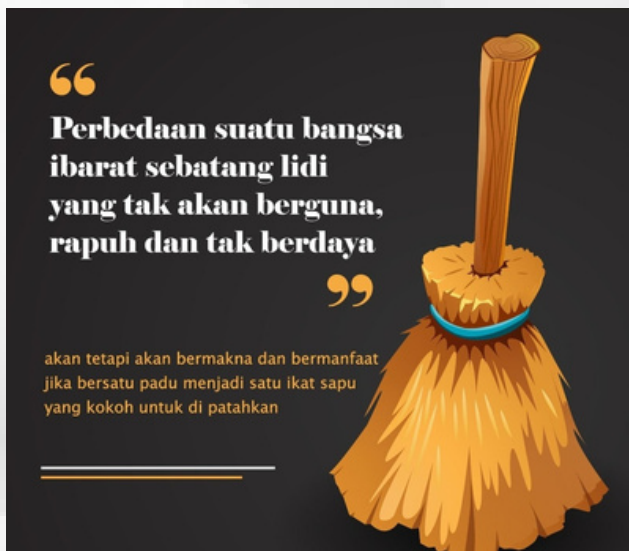
Sasaran 1: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator : Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD, dengan target 38% telah Berhasil tercapai sebesar 52,49% atau tercapai 138,13%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator: Persentase target tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai, dengan target 100% telah Berhasil tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 3: Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator: Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan, dengan target 100% telah Berhasil tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran 4: Meningkatkan kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah. Indikator : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dengan target BB (70-80) dengan realisasi tahun 2022 sebesar 84,43% dengan capaian 105,53% masuk kategori telah Berhasil dicapai. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.





8. Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2022 dengan melalui 4 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Sasaran 1.1: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan kualitas usulan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2022 antara lain:

- Melakukan inisiasi program pendampingan pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan unsur masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap program pemberdayaan masyarakat secara terbuka oleh Bappeda dan diberi bimbingan teknis terkait perencanaan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pendampingan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Harapannya, usulan masyarakat tidak lagi berdasarkan daftar keinginan tetapi merupakan kebutuhan prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan di lingkungan kelurahan/Desa/kecamatan;
- Memperbaiki petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang agar lebih bisa menjawab pertanyaan permasalahan di lapangan dan mudah dipahami pelaksana di lapangan;
- Memperbaiki dan menyesuaikan kamus usulan Musrenbang agar sesuai dengan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai dasar pegangan pemilihan program kegiatan di e-Musrenbang SIPD;
- Mengedukasi komponen pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan kecamatan tentang regulasi daerah terkait program pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan Updating Secara Berkala Jadwal Perencanaan Yang Dikondisikan Dengan Dinamika Proses Perencanaan Yang Berlangsung.





Selasa, 31 Januari 2023

BIMBINGAN TEKNIS

BAPPEDA Kabupaten Bone menggelar Bimbingan Teknis
Penatausahaan Keuangan Lingkup BAPPEDA Tahun 2023
di Makassar Room Hotel Novena, Kota Watampone,
Kabupaten Bone.

Sasaran 1.2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain:

- a. Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan yaitu:
 1. Perencanaan pembangunan daerah melalui semua tahapan yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai timeline yang diatur secara rigid oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Dokumen perencanaan pembangunan disusun sesuai sistematika yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Melakukan Peningkatan Kapasitas SDM BAPPEDA
- b. Pada saat menyusun dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD).
- c. Berupaya meningkatkan akomodir kebijakan daerah tentang tata ruang (RTRW) dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD), karena berdasarkan hasil verifikasi, dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) tahun 2021 hanya mengakomodir 75,89% indikasi program yang diamanatkan dalam dokumen RTRW/RDTR.
- d. Indikator kinerja dan target kinerja pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) telah dirumuskan secara SMART-C dan digunakan sebagai alat mencapai visi dan misi Kabupaten Bone.



Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan, Bappeda berupaya terus memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun petunjuk teknis penyusunan Renja termasuk template dokumen Renja yang harus disusun perangkat daerah dan petunjuk teknis forum perangkat daerah. Personil Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah;

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah, ada beberapa hal yang menjadi kendala dan perlu dipikirkan jalan keluar untuk perbaikan ke depan, sehingga target persentase perencanaan perangkat daerah yang sesuai ketentuan pada perencanaan jangka menengah sebesar 100% bisa tercapai. Beberapa hal yang menjadi kendala di tahun 2022.

Perangkat daerah belum menaati timeline tahapan perencanaan, terutama timeline pengumpulan rancangan awal, rancangan Renja dan rancangan akhir Renja termasuk rancangan dan rancangan akhir Renja perubahan. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu rancangan awal Renja disampaikan ke Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD paling lambat minggu pertama Bulan Desember N-2. Dalam implementasinya, beberapa perangkat daerah baru mengumpulkan dibulan Januari saat akan dilakukan konsultasi publik RKPD, sehingga terlambat 45 hari.

Sasaran 1.3: Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bappeda untuk meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:

- Bappeda memiliki 3 Bidang sektoral, sebagai bidang yang melaksanakan fungsi penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan, segera menindaklanjuti hasil kajian/analisa dengan menyampaikan kepada dinas teknis sebagai pelaksana di lapangan penyampaian tindak lanjut hasil kajian kepada perangkat daerah teknis dan memonitoring pelaksanaannya.
- Apabila kajian/analisa dalam bentuk road map/rencana aksi/grand design yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, maka bidang sektoral harus segera menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan rencana aksi/grand design/road map dimaksud;

Tujuan 2. Nilai Evaluasi Sakip Oleh APIP

Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Ke depan Bappeda perlu lebih meningkatkan komponen pengukuran dan capaian kinerja. Apabila ada capaian kinerja yang tidak tercapai, akan disampaikan alasan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak mempengaruhi penilaian Inspektorat Daerah saat evaluasi yaitu:

- Meningkatkan capaian kinerja pada komponen penilaian SAKIP
- Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah terkait hasil evaluasi SAKIP
- Meningkatkan pelayanan kesekretariatan.



B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar **Rp.7.694.408.000,00 (Tujuh Miliar Enam ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah)** sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Bappeda 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan. 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 2.260.720.840	Rp 2.209.339.148	97,72%
Sasaran 1.1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 250.196.860	Rp 231.557.953	92,55%
Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 646.613.170	Rp 638.268.787	98,71%
Sasaran 1.3. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan			
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.363.910.810	Rp 1.339.512.408	98,21%
Tujuan 2. Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Rp 5.433.687.160	Rp 5.186.504.285	95,45%
Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas implementasi kinerja dan pengelolaan keuangan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.433.687.160	Rp 5.186.504.285	95,45%
Total	7.694.408.000	7.400.606.934	96,18%

Sumber Data: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Bappeda Tahun 2022

BAB IV PENUTUP



Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. SIMPULAN UMUM

Rata rata Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Bappeda sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Bappeda. Mulai dari Indikator "Proporsi kegiatan usulan masyarakat terhadap total APBD" dengan capaian kinerja sebesar 138,13%, Indikator "Persentase target tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai" dengan capaian kinerja sebesar 100%, Indikator "Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Infrastruktur dan Kewilayahan" dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan Indikator "Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP" dengan capaian kinerja sebesar 105,53% dan capaian anggaran sebesar 95,45%.

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP bagi Bappeda juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Bappeda Pengukuran- pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bappeda pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena terdapat 4 indikator memenuhi kriteria Baik.



B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bappeda untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2022 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Bappeda ke depan yaitu sinkronisasi antara Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Bagi instansi di lingkungan Bappeda sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Bappeda untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam Proses peningkatan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bone, antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi perangkat daerah kepada Bappeda terkait pengendalian dan evaluasi sektoral perangkat daerah
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Perencana Perangkat Daerah baik kualitas maupun kuantitasnya
- c. Proses Perencanaan dan Penganggaran melalui Aplikasi SIPD Kemendagri yang seringkali terkendala oleh Proses Pemutakhiran Aplikasi Secara Sepihak Oleh Kemendagri, tanpa sosialisasi yang memadai kepada Pemerintah Daerah, seperti adanya pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, hingga sub kegiatan beserta indikator dan satuan targetnya, selain itu Updating data dan informasi perencanaan daerah secara berkala disetiap tahapan perencanaan yang berjalan sesuai dengan perkembangan pemutakhiran aplikasi SIPD Kemendagri.

Selain itu, upaya upaya yang dilakukan kedepannya untuk mendorong pencapaian kinerja di Bappeda Kabupaten Bone, antara lain:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Bimtek Baik Secara Daring Maupun Secara Luring dan Mengoptimalkan SDM yang tersedia dengan memperkuat komitmen dari seluruh personil di BAPPEDA dalam peningkatan budaya kerja.
- b. Melakukan koordinasi Menertibkan pelaporan OPD dalam penyajian Dokumen Evaluasi RKPD
- c. Updating data dan informasi perencanaan daerah secara berkala disetiap tahapan perencanaan yang berjalan sesuai dengan perkembangan pemutakhiran aplikasi SIPD Kemendagri.

